

## Peran United Nations Stabilization Mission in Haiti (Minustah) Dalam Mengatasi Krisis Keamanan di Haiti

### The Role of the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) in Addressing the Security Crisis in Haiti

Salsabila Aulia Irawan

Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

Correspondent Author: [salsabilaairawan@gmail.com](mailto:salsabilaairawan@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b></p> <p><i>United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), Haiti, Security Crisis, International Organizations, Humanitarian Intervention</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b></p> <p><i>United Nations Stablization Mission in Haiti (MINUSTAH), Haiti, Krisis Keamanan, Organisasi Internasional, Intervensi Kemanusiaan</i></p> <p><b>DOI:</b> 10.63280/jpsd.v2i1.48646</p>	<p><i>This study aims to understand the role of MINUSTAH in managing the security crisis in Haiti. This research is qualitative, with data collection and analysis based on a literature study. The findings are presented through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion or verification. The results of this study found that MINUSTAH represents a humanitarian intervention functioning as an instrument and arena for international collaboration, implementing various policies to create political stability and protect human rights.</i></p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran MINUSTAH dalam mengatasi krisis keamanan yang terjadi di Haiti. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pengambilan dan pengumpulan data yang berbasis studi pustaka kemudian hasilnya akan diurai dan dijelaskan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa MINUSTAH merupakan intevensi kemanusiaan yang berfungsi sebagai instrumen dan arena kolaborasi internasional, dengan beragam kebijakan yang diterapkan untuk menciptakan stabilitas politik dan melindungi hak asasi manusia.</p> <p>Copyright © 2026 JPSD. All rights reserved.</p>

## 1. Pendahuluan

Kekerasan telah menjadi sebuah fenomena yang tidak asing bagi masyarakat Haiti. Sejak peraihan kemerdekaannya, ketidakstabilan politik terus melanda dan menjadi salah satu isu sentral yang terus dihadapi oleh negara ini. Haiti adalah salah satu negara termiskin di Karibia. Utang luar negeri, korupsi pemerintahan, embargo AS selama tiga tahun sejak 1991, dan bencana alam telah melemahkan ekonominya. Masalah-masalah ini mengancam kesejahteraan masyarakat Haiti. Ketidakstabilan ekonomi dan sosial membuat akses ke sumber daya dasar seperti makanan, air bersih, dan perawatan kesehatan semakin sulit. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketidaksetaraan ekonomi memperburuk ketegangan sosial dan meningkatkan risiko konflik antar warga.

Krisis politik dan ekonomi yang berkelanjutan di Haiti telah menarik perhatian dan tindakan cepat dari komunitas internasional, khususnya PBB. Resolusi 1529 yang disetujui dengan suara bulat mencerminkan urgensi dan kesepakatan global mengenai perlunya intervensi untuk menstabilkan Haiti (UN News, 2004). Penempatan Pasukan Sementara Multinasional selama tiga bulan bertujuan untuk memberikan respons awal terhadap situasi darurat, mencakup aspek politik, keamanan, dan kemanusiaan (United Nations, 2004). Langkah ini diikuti dengan pengesahan Resolusi 1542, yang menandai transisi ke misi penjaga perdamaian yang lebih permanen, yakni United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH). Hal ini menunjukkan bahwa komunitas internasional menyadari perlunya pendekatan jangka panjang untuk menanggulangi krisis di Haiti. Keputusan untuk mengalihkan tugas dari MIF ke MINUSTAH menunjukkan komitmen PBB untuk tidak hanya memberikan bantuan sementara tetapi juga untuk membangun fondasi bagi stabilitas dan keamanan yang berkelanjutan. Keberhasilan misi ini sangat bergantung pada kerjasama yang efektif antara pasukan penjaga perdamaian dan otoritas lokal dalam menangani akar permasalahan yang menyebabkan ketidakstabilan di Haiti.

Sebuah penelitian yang berbentuk tesis dan ditulis oleh Luc Edwin Ceïde seorang mahasiswa Pascasarjana Centre for Peace Studies di Universitas Tromso pada tahun 2004 dengan judul "Securing Peace in Haiti: An Assesment of the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) Penelitian ini berfokus pada peran MINUSTAH dalam memberikan stabilitas, keamanan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta supremasi hukum di Haiti. Penelitian ini menunjukkan bahwa MINUSTAH dipersepsikan kurang memahami konteks lokal oleh masyarakat Haiti. Dengan mengabaikan isu-isu sejarah dan budaya, MINUSTAH menghadapi kesalahpahaman yang membuat keberhasilannya menjadi semakin sulit. Pasukan PBB dianggap melindungi kepentingan elit dan memberikan keamanan kepada pemerintah yang korup. Di mata rakyat miskin Haiti, MINUSTAH kehilangan kredibilitas setelah sejumlah insiden negatif dan dianggap tidak efektif dalam membangun perdamaian.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pemilihan topik yang membahas tentang peran MINUSTAH dalam mengatasi krisis keamanan di Haiti. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada teori dan konsep yang digunakan. Penelitian ini menggunakan *conceptual discussion, fragile or failed state, structural violence, do not harm approach*, dan *race, class, voodoo and culture*. Sedangkan, penelitian penulis menggunakan teori organisasi internasional dan konsep intervensi kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini terbatas sampai tahun 2008, sedangkan penelitian penulis sampai akhir periode MINUSTAH, yaitu tahun 2017.

## 2. Metodologi

Penelitian ini akan menggunakan data diperoleh melalui studi pustaka. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka mencakup informasi dan pemahaman yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya dalam bidang studi yang relevan. Studi Pustaka melibatkan pencarian dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi yang dikeluarkan oleh MINUSTAH. Penulis akan mengevaluasi dan menginterpretasikan data tersebut untuk mendapatkan wawasan yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, penulis akan melakukan analisis terhadap data kualitatif dan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan dan pola yang terdapat pada data. Secara spesifik, penulis terlebih dahulu akan mengumpulkan data-data terkait keputusan MINUSTAH di Haiti. Kemudian, penulis akan menelusuri dengan menggunakan analisis dan identifikasi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh MINUSTAH dalam membentuk kebijakan keamanan di negara tersebut untuk menarik kesimpulan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Resolusi 1524 Dewan Keamanan, mandat MINUSTAH mencakup tiga kategori utama: menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, mendukung proses politik yang demokratis, dan melindungi hak asasi manusia, terutama untuk perempuan dan anak-anak. Ketiga mandat ini saling terkait dalam upaya mengatasi krisis keamanan. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, diperlukan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan, yang mampu mengelola konflik politik secara damai dan mencegah terjadinya kerusuhan. Pemerintahan yang baik juga harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia, yang akan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan warga negara terhadap institusi negara. Keamanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau penegakan hukum yang ketat, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik yang tercipta melalui kebijakan yang adil dan inklusif, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, keamanan dan stabilitas dapat dicapai melalui

pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyatnya, serta komitmen kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam upaya mengatasi krisis keamanan di Haiti, MINUSTAH memainkan berbagai peran yang dapat dikategorikan sebagai instrumen, arena, dan aktor.

MINUSTAH sebagai instrumen bertindak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang diatur oleh mandat Dewan Keamanan PBB. Perannya sebagai instrumen mencakup berbagai tindakan operasional dan kapasitas pengembangan yang dirancang untuk mendukung institusi lokal dan menegakkan supremasi hukum. Salah satu mandat MINUSTAH yang tercantum di Resolusi 1542 adalah melakukan memonitor, rekonstruksi dan reformasi Kepolisian Nasional Haiti (HNP). Dalam menjalankan mandatnya, MINUSTAH telah bekerja sama dengan HNP untuk mengatasi peningkatan penculikan pada 2008, setelah penurunan tajam pada 2007. Langkah-langkah seperti berbagi informasi yang lebih baik, memperkuat sel anti-penculikan, dan meningkatkan patroli serta komunikasi publik menunjukkan pendekatan strategis MINUSTAH dalam mengatasi masalah keamanan. Namun, meskipun ada penurunan angka penculikan dan pembunuhan seperti di tahun 2013, keberhasilan ini lebih banyak terjadi karena tindakan taktis sementara daripada solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam menangkap beberapa pelaku penculikan hanya memberikan hasil sementara, karena masalah mendasar seperti kelemahan ekonomi dan sosial yang memicu kejahatan tetap tidak terselesaikan.

Lebih lanjut, MINUSTAH dapat dilihat sebagai arena kolaborasi dan interaksi internasional, khususnya di wilayah Amerika Latin. Dengan adanya kontribusi yang signifikan dari negara-negara tetangga Haiti, MINUSTAH menjadi platform di mana kepentingan regional dan global bertemu, menjadikannya tidak hanya sebagai misi stabilisasi tetapi juga sebagai ruang untuk diplomasi multilateral dan koordinasi kebijakan.

Sebagaimana yang sering terjadi di banyak wilayah konflik, negara-negara tetangga juga terkena dampaknya ketika sebuah kawasan sedang mengalami konflik. Negara-negara anggota MINUSTAH memiliki rasa kepemilikan regional yang kuat terhadap misi ini, didasarkan pada kontribusi mereka yang memiliki hubungan erat dengan Haiti. Hubungan ini tidak hanya ditentukan oleh kedekatan geografis tetapi juga oleh ikatan budaya dan sejarah yang mendalam. Komitmen negara-negara Amerika Latin untuk mendukung pembangunan di Haiti terlihat dari pembentukan mekanisme kelembagaan yang dikenal sebagai '2x9'. Mekanisme ini berbentuk pertemuan rutin antara wakil menteri pertahanan dan hubungan luar negeri dari sembilan negara Amerika Latin yang terlibat dalam MINUSTAH dan otoritas Haiti. Melalui mekanisme ini, negara-negara Amerika Latin dapat mengkoordinasikan posisi bersama mereka di Dewan Keamanan PBB terkait situasi di Haiti, menciptakan sinergi dan koordinasi yang lebih baik dalam upaya stabilisasi dan pembangunan negara tersebut (Diamint, 2007).

Selain itu, meskipun tidak secara langsung termasuk dalam mandat MINUSTAH, memerangi kemiskinan dan kelaparan di Haiti menjadi perhatian bersama negara-negara Amerika Latin. Isu ini menciptakan ruang dialog antara

dunia Utara dan Selatan, meskipun tetap berada dalam kerangka agenda liberal. Misi yang dianggap sebagai salah satu tantangan terbesar PBB ini, sebagian besar dilaksanakan oleh negara-negara Amerika Latin, terutama Brasil, Chili, dan Uruguay. Negara-negara Amerika Latin menyumbangkan sekitar 60% dari total pasukan PBB yang dikerahkan di Haiti. Kontribusi militer ini mencakup 7.039 personel yang berasal dari berbagai negara, termasuk Argentina (558, termasuk rumah sakit lapangan), Bolivia (208), Brasil (2.200), Kanada (10), Chili (499), Kroasia (3), Ekuador (67), Prancis (2), Guatemala (118), Yordania (728), Nepal (1.075), Paraguay (31), Peru (209), Filipina (157), Sri Lanka (959), Amerika Serikat (4), dan Uruguay (1.135).

MINUSTAH, bekerja sama dengan Organization of American States (OAS), memainkan peran penting dalam mendukung proses pemilu di Haiti. Salah satu inisiatif penting adalah penyelenggaraan lokakarya pelatihan bagi anggota Provisional Electoral Council (CEP) yang diadakan oleh Federal Electoral Institute of Mexico pada November 2004. Selain itu, anggota lembaga pemilu dari Republik Dominika, El Salvador, Panama, dan Venezuela turut serta memberikan pelatihan yang relevan (Security Council, 2005). Upaya ini menunjukkan bagaimana MINUSTAH berfungsi sebagai arena untuk kolaborasi regional, mempertemukan berbagai negara dengan pengalaman pemilu yang berbeda untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan guna memperkuat kapasitas lembaga pemilu Haiti.

Namun, dalam perannya sebagai aktor MINUSTAH tidak dapat dikategorikan sebagai aktor independen dalam konteks operasional dan strategisnya di Haiti. Sebagai misi perdamaian PBB, MINUSTAH beroperasi di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang menentukan arah dan batasan dari setiap tindakan yang mereka ambil. Mandat ini menggariskan tujuan dan parameter spesifik, seperti stabilisasi politik, reformasi kepolisian, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, MINUSTAH tidak memiliki otonomi penuh dalam merancang dan melaksanakan kebijakan atau operasi di lapangan. Setiap intervensi, baik itu dalam bidang keamanan, pembangunan kapasitas, atau bantuan kemanusiaan, selalu berada dalam kerangka kerja yang disetujui oleh Dewan Keamanan.

Keterlibatan MINUSTAH di Haiti juga mencerminkan komitmen dan kebijakan dari negara-negara anggota PBB yang menyumbangkan personel dan sumber daya untuk misi ini. Keputusan operasional dan strategi yang diambil oleh MINUSTAH harus sesuai dengan konsensus internasional dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan. Hal ini membatasi kemampuan MINUSTAH untuk bertindak sebagai aktor independen dengan agenda dan tujuan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka bertindak sebagai instrumen yang melaksanakan mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan, berfungsi lebih sebagai pelaksana daripada pengambil keputusan utama.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) dalam mengatasi krisis keamanan di Haiti dan tantangannya, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan MINUSTAH di Haiti merupakan sebuah intervensi kemanusiaan yang dilaksanakan berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Menurut perspektif teori organisasi internasional, peran organisasi internasional dapat dikategorikan menjadi tiga: sebagai instrumen, arena, dan aktor. Dalam konteks ini, MINUSTAH berperan sebagai instrumen dan arena. Sebagai instrumen, MINUSTAH bertindak untuk mengimplementasikan mandat Dewan Keamanan, sementara sebagai arena, MINUSTAH menjadi wadah interaksi dan kolaborasi antara negara-negara dan organisasi internasional lainnya. Namun, MINUSTAH tidak berperan sebagai aktor independen karena seluruh tindakannya selalu berdasarkan mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan. Dalam usahanya mengatasi krisis keamanan di Haiti, MINUSTAH telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, menstabilkan proses politik, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia di negara tersebut.

## Daftar Pustaka

UN News. (2004, Februari 29). *Security Council authorizes three-month Multinational Interim Force for Haiti*. Retrieved from <https://news.un.org/en/story/2004/02/95652>

United Nations Security Council. (2004). *Resolution 1542*. United Nations.

Diamint, R. (2007). The 2x9: An Incipient Security Community in Latin America? *Police Paper 18*, 1-8.

Security Council. (2005). *Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti*. United Nations Security Council.

Security Council. (2006). *Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti*. United Nations Security Council.

Security Council. (2008). *Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti*. United Nations Security Council.

Kolbe, A. R., & Hutson, R. A. (2006). Human rights abuse and other criminal violations in Port-au-Prince, Haiti: a random survey of household. *The Lancet*, 864-873.

United Nations Security Council. (2004). *Resolution 1542*. United Nations.